

## **Optimalisasi Pendataan Usaha Perikanan Berbasis OSS di DPMPSTSP Provinsi NTB**

**Sari Gading<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>, Nia Wahidhatun Nisa<sup>3</sup>, Asfarony Hendra Nazwin<sup>4</sup>**

*<sup>1,2,3,4</sup> Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Sari Gading

**E-mail:** [sariigading@gmail.com](mailto:sariigading@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kegiatan magang ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu bulan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kondisi eksisting pendataan izin usaha perikanan berbasis Online Single Submission (OSS), mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengusulkan strategi optimalisasi yang relevan dan aplikatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif partisipatif, di mana penulis sebagai peserta magang terlibat langsung dalam proses pelayanan perizinan melalui observasi, wawancara dengan pegawai, serta penelaahan dokumen terkait sistem OSS, SIMKADA, dan SILAT. Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa sistem perizinan berbasis OSS telah terintegrasi dengan SIMKADA dan SILAT dalam proses penerbitan izin usaha perikanan, namun masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan sistem SIMKADA serta keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi petugas maupun pelaku usaha. Optimalisasi pendataan izin usaha perikanan memerlukan peningkatan kapasitas SDM, evaluasi sistem secara berkala, dan penguatan koordinasi antarinstansi agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan transparan.*

**Kata kunci** – OSS, Izin Usaha Perikanan, DPMPSTSP, Pendataan, Optimalisasi

### **Abstract**

*This internship activity was conducted at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPSTSP) of West Nusa Tenggara Province for one month, with the aim of describing the existing conditions of fisheries business licensing data collection based on the Online Single Submission (OSS) system, identifying obstacles encountered in its implementation, and proposing relevant optimization strategies. The method used was a participatory descriptive approach, in which the authors as internship participants were directly involved in the licensing service process through observation, interviews with staff, and review of documents related to the OSS, SIMKADA, and SILAT systems. The results of the internship showed that the OSS-based licensing system has been integrated with SIMKADA and SILAT in the issuance of fisheries business licenses, but still faces technical obstacles including SIMKADA system errors and limited human resource capacity among both officers and business actors. Optimization of fisheries business licensing data collection requires improved human resource capacity, regular system evaluation, and strengthened inter-agency coordination to ensure more effective, accurate, and transparent licensing services.*

**Keywords** - OSS, Fishery Business License, DPMPSTSP, Data Collection, Optimization

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Digitalisasi layanan administrasi pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan (Ayunda dkk., 2021) dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat (Basyo & Anirwan, 2023). Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah penerapan sistem perizinan usaha berbasis elektronik melalui Online Single Submission (OSS), yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif (Kusnadi & Baihaqi, 2020).

Sistem OSS dirancang sebagai platform perizinan terpadu yang mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan izin usaha secara elektronik (Feliks & Maryuni, t.t.). Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengakses layanan perizinan tanpa harus mendatangi berbagai instansi secara terpisah, sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan terstruktur dibandingkan dengan mekanisme konvensional. Lebih dari itu, OSS diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perizinan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usahanya (Bakhrur Rokhman dkk., 2024).

Pemberlakuan OSS dilandasi oleh sejumlah regulasi hukum yang kuat, mulai dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, hingga *Omnibus Law* lewat undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (Brigitta Tesselonika Injilia Pangemanan & Edwin Neil Tinangon, t.t.). Kerangka regulasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem perizinan yang terintegrasi secara digital (Yudani dkk., 2023), di mana mekanisme perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi disatukan ke dalam satu platform yang dapat diakses secara terpadu (Badawi & Wedhatami, t.t.). Integrasi lintas instansi ini menjadi kunci dalam mewujudkan koordinasi yang lebih terstruktur dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha di Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan di tingkat daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat memegang peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis OSS. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (2026), DPMPTSP tidak hanya bertugas memberikan layanan administrasi perizinan, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan serta pemutakhiran data perizinan yang akurat dan terintegrasi bagi masyarakat pelaku usaha (Hidayat dkk., 2024). Oleh karena itu, kualitas integrasi data perizinan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi sistem OSS dalam mendukung pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha di Provinsi NTB.

Salah satu sektor yang memiliki urgensi tinggi dalam implementasi sistem OSS di Provinsi NTB adalah sektor perikanan. Sebagai provinsi kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, NTB memiliki potensi perikanan yang besar baik dalam kegiatan penangkapan maupun budidaya (Putra, 2023). Potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan secara berkelanjutan apabila didukung oleh sistem tata kelola perizinan usaha perikanan yang jelas, tertata, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam konteks inilah keberadaan sistem OSS di bidang perizinan perikanan menjadi sangat relevan dan strategis.

Meskipun demikian, implementasi sistem OSS dalam pendataan izin usaha perikanan di DPMPTSP Provinsi NTB masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Dari sisi teknis, gangguan pada sistem SIMKADA sebagai platform verifikasi dokumen perizinan daerah kerap menjadi hambatan dalam proses penerbitan izin. Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat keterbatasan kemampuan petugas dalam mengoperasikan sistem berbasis digital, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap prosedur penggunaan OSS. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan data perizinan,

sehingga data yang tersedia belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat dan berbasis bukti.

Bertolak dari permasalahan tersebut, kegiatan magang yang dilaksanakan penulis di DPMPTSP Provinsi NTB menjadi momentum untuk mengamati secara langsung kondisi pelaksanaan pendataan izin usaha perikanan berbasis OSS. Sebagai peserta magang yang terlibat aktif dalam proses pelayanan, penulis berkesempatan mengidentifikasi secara empiris berbagai kendala yang dihadapi, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan yang relevan dan dapat diimplementasikan oleh instansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi eksisting pendataan izin usaha perikanan berbasis OSS di DPMPTSP Provinsi NTB, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi optimalisasi yang relevan dan aplikatif berdasarkan pengalaman langsung selama kegiatan magang. Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi DPMPTSP Provinsi NTB dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan perikanan, sekaligus memperkaya kajian akademis mengenai implementasi tata kelola perizinan berbasis teknologi informasi di daerah.

## **METODE**

Kegiatan magang ini dilaksanakan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif partisipatif, di mana penulis sebagai peserta magang terlibat secara langsung di DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kegiatan magang berlangsung. Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pelayanan perizinan, khususnya pada pendataan izin usaha perikanan berbasis Online Single Submission (OSS), sehingga dapat memahami secara langsung kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi untuk mengetahui kondisi pelayanan perizinan berbasis OSS serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses pendataan izin usaha perikanan. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung alur pelayanan mulai dari proses pengajuan izin, penginputan data, verifikasi dokumen, hingga tahap penerbitan izin usaha. Selanjutnya, dilakukan wawancara dan diskusi dengan pegawai yang menangani bidang perizinan guna memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai mekanisme pelayanan, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengelolaan data perizinan. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memperkuat hasil observasi sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas terkait pelaksanaan sistem OSS di lapangan. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan serta penelaahan dokumen yang berkaitan dengan sistem OSS, SIMKADA, SILAT, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan izin usaha perikanan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai data tambahan untuk mendukung analisis terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual pendataan izin usaha perikanan berbasis OSS di DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari hasil analisis tersebut, dirumuskan upaya-upaya optimalisasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan, serta integrasi dalam pengelolaan data perizinan usaha perikanan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama pelaksanaan kegiatan magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, penulis mengamati bahwa optimalisasi pendataan izin usaha perikanan berbasis Online Single Submission (OSS) merupakan aspek yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor perikanan. Sistem OSS diterapkan sebagai platform utama dalam proses pengajuan izin usaha oleh pelaku usaha, dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perizinan.

Pelaksanaan izin usaha perikanan tidak hanya bergantung pada OSS, tetapi juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA) dan sistem SILAT. OSS berfungsi sebagai pintu awal pengajuan izin, sedangkan SIMKADA digunakan untuk proses verifikasi dan validasi dokumen pada izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adapun SILAT digunakan untuk izin yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Integrasi ketiga sistem ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan perizinan yang lebih efektif dan terstruktur.



**Gambar 1.**

Proses input data izin usaha perikanan melalui sistem OSS

Proses pelayanan dimulai ketika pelaku usaha menginput data permohonan izin melalui sistem OSS. Setelah data diisi secara lengkap, sistem akan secara otomatis mengarahkan permohonan sesuai dengan kewenangan instansi yang berwenang. Jika izin tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka data akan diteruskan ke SIMKADA untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Dalam SIMKADA, pelaku usaha wajib mengunggah berbagai dokumen persyaratan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), izin penangkapan ikan, izin kapal pengangkut ikan, serta izin pemasangan rumpon. Dokumen tersebut kemudian diperiksa oleh petugas dari DPMPTSP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya.



**Gambar 2.**

Proses Verifikasi Dokumen Menggunakan SIMKADA

Setelah proses verifikasi selesai, petugas akan menyusun draft izin yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan. Jika telah disetujui, izin akan diterbitkan melalui SIMKADA dan secara otomatis terintegrasi kembali ke dalam sistem OSS. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengakses hasil izin melalui akun OSS masing-masing tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi informasi.



**Gambar 3.**

Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Perizinan

Setelah proses verifikasi selesai, petugas akan menyusun draft izin yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan. Jika telah disetujui, izin akan diterbitkan melalui SIMKADA dan secara otomatis terintegrasi kembali ke dalam sistem OSS. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengakses hasil izin melalui akun OSS masing-masing tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi informasi.

Namun demikian, temuan selama magang juga menunjukkan bahwa implementasi sistem OSS dalam pendataan izin usaha perikanan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan utama yang ditemukan adalah gangguan teknis pada sistem SIMKADA, seperti error system, lambatnya proses akses, serta beberapa fitur yang tidak berfungsi secara optimal. Kondisi ini menghambat proses verifikasi dokumen dan memperlambat penerbitan izin usaha. Selain itu, pengelolaan sistem yang masih bergantung pada pusat menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan perbaikan secara mandiri ketika terjadi gangguan teknis.

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi petugas pelayanan maupun pelaku usaha. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem berbasis digital, sehingga proses pelayanan terkadang mengalami hambatan administratif. Di sisi lain, masih banyak pelaku usaha perikanan yang belum memahami secara baik prosedur penggunaan OSS, terutama dalam proses penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan. Kurangnya pemahaman ini sering menyebabkan kesalahan input data yang berdampak pada keterlambatan proses perizinan.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya optimalisasi pendataan izin usaha perikanan berbasis OSS perlu dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis bagi pegawai serta sosialisasi intensif kepada pelaku usaha mengenai prosedur penggunaan OSS. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi sistem secara berkala untuk meminimalkan gangguan teknis serta memperkuat koordinasi antara DPMPSTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan instansi pusat agar integrasi data dapat berjalan lebih efektif.

Dengan adanya optimalisasi tersebut, diharapkan pelayanan perizinan usaha perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan. Pengelolaan data yang baik tidak hanya mendukung kelancaran pelayanan publik, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan selama satu bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, penulis menemukan bahwa sistem perizinan usaha perikanan berbasis OSS telah berjalan secara terintegrasi dengan sistem SIMKADA dan SILAT. OSS berfungsi sebagai pintu awal pengajuan izin, SIMKADA digunakan untuk verifikasi dan validasi dokumen pada izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sementara SILAT menangani izin yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Integrasi ketiga sistem ini mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, selama kegiatan magang penulis juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi sistem tersebut. Kendala teknis pada sistem SIMKADA, seperti error system dan lambatnya akses, serta ketergantungan pengelolaan sistem pada pemerintah pusat menjadi hambatan utama yang membatasi kemampuan daerah dalam melakukan perbaikan secara mandiri. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia baik dari petugas pelayanan maupun pelaku usaha perikanan dalam memahami dan mengoperasikan sistem digital turut memengaruhi efektivitas proses perizinan. Oleh karena itu, optimalisasi pendataan izin usaha perikanan berbasis OSS di DPMPTSP Provinsi NTB memerlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan sosialisasi yang berkelanjutan, evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan data perizinan dapat berjalan lebih akurat dan terintegrasi, sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik dalam pengembangan sektor perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta fasilitas selama pelaksanaan kegiatan magang ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pegawai dan pihak terkait yang telah berpartisipasi, memberikan informasi, serta membantu dalam proses pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan magang di lapangan.

Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan magang ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71–84. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4359>
- Badawi, A., & Wedhatami, B. (t.t.). *Implementasi Online Single Submission Sebagai Penyederhanaan Birokrasi Perizinan Untuk Meningkatkan Peluang Perizinan Berusaha Dan Investasi*.
- Bakhrur Rokhman, Tobirin, Ali Rokhman, & Denok Kurniasih. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399>
- Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i1.477>

- Brigitta Tesselonika Injilia Pangemanan, K., & Edwin Neil Tinangon. (t.t.). *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik Online Single Submission (Oss) Di Kota Tomohon Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*.
- Feliks, A., & Maryuni, S. (t.t.). *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau*.
- Hidayat, R., Fitri, S. L., Hidayatullah, H., & Dermawan, M. A. (2024). Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) (Studi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 10(1), 56–79. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i1.621>
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.926>
- Putra, A. A., & Nurasikin, N. (2023, November). Tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan* (pp. 123-143).
- Yudani, W. S., Waluyo, W., & Subekti, R. (2023). Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 2(3), 121. <https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53611>